

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN USAHA  
PENGOLAHAN NENAS DI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2016-2017**

**Oleh : Risna Yuli Busmelda**

[yulibusmeldarisna@gmail.com](mailto:yulibusmeldarisna@gmail.com)

**Pembimbing : Drs. Erman M, M,si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*This study is entitled "The Efforts of Local Governments in Developing Pineapple Processing Enterprises in Tambang District of Kampar Regency year of 2016-2017". This study aims to determine the efforts of the Regional Government in developing pineapple processing businesses in the Tambang District of Kampar Regency and the inhibiting factors of the Regional Government's energy in developing the Pineapple Processing Business in the Tambang District of the Kampar Regency.*

*The method used in this research is qualitative method. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. While the data used are primary data obtained from research locations in the form of research informants, which are then supported by secondary data in the form of document data.*

*The results of this study indicate that the efforts of local governments in developing pineapple processing businesses in the Tambang District of Kampar Regency include coaching and development, product quality improvement, financing and cooperation. While the inhibiting factors of the local government in the effort to develop pineapple processing businesses in the Tambang District of Kampar Regency are budget constraints and unattractive packaging appearance.*

***Keywords: Local Government, pineapple processing, development.***

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Terkait dengan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk Kabupaten/Kota yang salah satunya adalah bidang perindustrian, sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang terdapat pada Bab I Pasal 12 bahwa Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Salah satu urusan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah adalah urusan Perindustrian

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Industri pasal 1 ayat 2, Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Industri merupakan sektor yang dapat memberikan peranan besar bagi pembangunan suatu daerah sekaligus memberikan kontribusi dari bagi pendapatan daerah serta lapangan pekerjaan. Melihat peranan dan kontribusi yang besar maka perlu dikembangkan dan dilakukan pembinaan secara berkelanjutan, sehingga pengembangan yang dilakukan tidak hanya berperan besar bagi daerah tetapi juga berdampak pada hasil pendapatan perekonomian masyarakat. Salah satu daerah yang memiliki potensi dan memberikan peran besar bagi pembangunan daerah di bidang

perindustriannya yaitu Kecamatan Tambang. Kecamatan Tambang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Kampar di wilayah provinsi Riau.

Dalam hal pengembangan dan pembangunan industri di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 15, pembangunan sumberdaya industri meliputi:

- a. Pembangunan sumberdaya manusia;
- b. Pemanfaatan sumber daya alam;
- c. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan
- e. Penyediaan sumber pembiayaan.

Upaya pengembangan dan pembangunan industri Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, pemerintah daerah memberikan wewenang kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2014, Tentang perubahan pertama atas peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Adapun tugas pokok Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam Peraturan Daerah yaitu Dinas perindustrian, perdagangan dan pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam bidang perindustrian, perdagangan dan pasar, dan memiliki beberapa fungsi penting dalam upaya mengembangkan perindustrian dan tenaga kerja yang ada di Kecamatan Tambang.

Sebagai pihak yang berwenang dalam menangani masalah perindustrian, Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja memiliki Program dan Indikasi Kegiatan yang berkaitan dengan perindustrian, yang dikategorikan dalam Rencana Kerja

Tahunan dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar tahun 2016 dan 2017 yaitu Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial, dengan uarian program sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengembangan sentra industri (DAK)
2. Peningkatan sarana dan prasarana rumah kemas
3. Studi kelayakan dan masterplan kawasan industri
4. Peningkatan kemampuan IKM sandang
5. Pengembangan dan promosi produk unggulan IKM

Salah satu jenis industri yang memiliki potensi yang bagus untuk dikembangkan di Kecamatan Tambang adalah industri pengolahan nenas, mengingat jumlah produksi buah nenas yang banyak tiap tahunnya di Kecamatan Tambang dibanding dengan 21 Kecamatan lain yang ada Kabupaten Kampar. Seperti data yang diperoleh pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Produksi Buah Nenas Kabupaten**  
**Kampar Tahun 2014-2017**  
**(dalam Ton)**

Kecamatan	2014	2015	2016	2017
Kampar Kiri	0	0	0	0
Kampar Kiri Hulu	0,68	0,60	0,53	37
Kampar Kiri Hilir	0,75	1,80	1,50	8,3
Gunung Sahilan	0,3	0,94	1,17	5,5
Kampar Kiri Tengah	0,59	1,58	1,56	5,5
XIII Koto Kampar	4,72	2,10	2,40	6,1
Koto Kampar Hulu	0,39	1,85	1,50	6,4
Kuok	0,19	0,32	0,32	2,7

Salo	0,15	0,14	0,14	0,4
Tapung	15,60	15,60	0	26,8
Tapung Hulu	6	2,40	5,74	19,6
Tapung Hilir	0,6	0,15	0,15	1,3
Bangkinang Kota	0,18	0,08	0,20	0,4
Bangkinang	0,9	1,50	0,75	0
Kampar	0,07	1,17	0,06	0,4
Kampar Timur	0,45	0	0	0
Rumbio Jaya	0,3	0	0	0
Kampar Utara	1,88	1,21	0,80	2,9
Tambang	12,750	4,650,00	6,000,00	12,765,0
Siak Hulu	0,92	0,74	1,02	3,7
Perhentian Raja	6,75	5,70	6,00	11,8

Sumber: BPS Kabupaten Kampar 2018

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat banyaknya jumlah produksi nenas di Kecamatan Tambang tahun 2014-2017. Jika diurutkan, tiga Kecamatan yang menjadi penghasil nenas terbesar antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 yaitu di posisi pertama ada Kecamatan Tambang pada tahun 2017 hasil produksi terbesar yaitu mencapai 12.765,0 ton. Sedangkan di posisi kedua ada Kecamatan Tapung dengan produksi terbesar mencapai 26,8 ton pada tahun 2017, dan di posisi ketiga ada Kecamatan Tapung Hulu dengan produksi terbesar di tahun 2017 mencapai 19,6 ton. Hasil produksi buah nenas yang melimpah menjadikan Kecamatan Tambang sebagai sentra produksi buah nenas yang ada Kabupaten Kampar. Kecamatan Tambang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar yang terdiri dari tujuh belas desa. Dari tujuh belas desa yang ada di Kecamatan Tambang hanya dua desa yang menjadi sentra produksi

penghasil nenas yaitu Desa Rimba Panjang dan Desa Kualu Nenas.

Tidak hanya terkenal dengan sentra produksi buah nenas terbesar yang ada di Kabupaten Kampar, tetapi Kecamatan Tambang juga terkenal dengan rasa buah nenas yang memiliki cita rasa buah yang manis dan sedikit asam Karena varietas nenas yang banyak dikembangkan di daerah ini adalah varietas Queen / Moris yang mempunyai rasa manis dan sedikit asam, serta seratnya yang rendah. Berat buah nenas berkisar antara 0,5 – 1,5 Kg/buah, dengan warna kulit buah bila telah masak adalah kuning dan memiliki mata yang dalam, sedangkan daging buah berwarna kuning tua dengan inti buah kecil. Tidak hanya di konsumsi secara langsung dalam keadaan buah segar tapi buah nenas yang ada di Kecamatan Tambang ini juga di produksi dalam bentuk berbagai bentuk olahan yang berbahan dasar buah nenas.

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan di atas mengenai hasil produksi buah nenas yang berlimpah di Kecamatan Tambang sehingga tidak hanya di konsumsi secara langsung saja tetapi juga di produksi dalam bentuk olahan yang menarik, mengingat ketersediaan bahan baku yang cukup banyak sehingga memudahkan para pengolah industri kecil menengah untuk mendapatkan bahan baku utama yaitu nenas. Maka dari itu penulis tertarik untuk mealakukan penelitian dengan judul **“Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Usaha Pengelolaan Nenas di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2016-2017”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengembangkan usaha pengolahan nenas di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tahun 2016-2017?
2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan usaha

pengolahan nenas di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tahun 2016-2017?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan usaha pengolahan nenas di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tahun 2016-2017.
2. Untuk mendeskripsikan faktor yang menjadi penghambat upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan usaha pengolahan nenas di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Menambah referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sosial politik dan pemerintahan, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi penggunaannya.

#### **b. Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat memberikan kontribusi, masukan kepada Pemerintah Daerah dalam upaya mengembangkan usaha pengolahan nenas di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan menjadi tambahan ilmu bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama bagi peneliti sendiri.

## **1.4 Tinjauan pustaka**

### **1.4.1 Studi Terdahulu**

Dapat diuraikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relavan dengan penelitian ini. Pertama, Desi Hardianti (2018) tentang “Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Pariwisata Festival Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2017”. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, bahwa pemerintah daerah dalam membangun kepariwisataan festival pacu jalur masih kurang. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat bagi pemerintah daerah dalam membangun kepariwisataan festival pacu jalur yaitu berasal dari faktor internal dan faktor ektrnal.

Kedua, Definta Aliffiana (2017) tentang “Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemerdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sentra Industri Konveksi dan Bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus”. Dari hasil penelitin yang diperoleh Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemerdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sentra Industri Konveksi dan Bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus”. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa industri tersebut merupakan usaha perorangan yang mengandalkan modal milik pribadi dengan jumlah yang sangat terbatas. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan bantuan modal dana usaha karena terlalu besar dana untuk produksi konveksi dan bordir serta berkaitan dengan tanggungan dan resiko yang sangat besar.

#### 1.4.2 Kerangka Teori

##### 1.4.2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan (*Policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksankannya. Menurut Anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai makasud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasar pada fenomena yang harus di carikan solusinya. Kebijakan publik dapat didefinsikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan

kebijakan. Thoha memberikan penafisiran tentang kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada proses hasil yang dibuat.

Menurut Edward III dalam Subarsono, bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan

pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumen pribadi, catatan/memo, dan dokumen resmi lainnya. Dalam konteks ini pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dihasilkan dari data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti..

### 1.7.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran tentang upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan usaha pengolahan nenas di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tahun 2016-2017.

### 1.7.3 Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, yaitu “Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Usaha Pengolahan Nenas di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tahun 2016-2017” maka jelas penelitian dilaksanakan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

### 1.7.4 Sumber Penelitian

#### a. Informan

Informan adalah orang dalam pada lokasi tempat penelitian diadakan, atau dapat juga orang yang merupakan anggota masyarakat setempat.

**Tabel 1.3**

**Data Informan Penelitian**

Nama	Jabatan
Drs. Ali Sabri	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja Kabupaten Kampar
Yelmi Marita S.Pt	Kepala Bidang Program dan Perencanaan
Agusni Mariani SH	Bidang Pembinaan Industri Kecil Menengah

Kamal Idris SE	Kasi Pendataan dan Pelaporan Industri
Muslimin	Pemilik usaha olahan nenas
Kayarudin	Pemilik usaha olahan nenas
Lela	Pedagang nenas
Martini	Pedagang nenas

*Sumber : Data lahan peneliti, 2019*

#### b. Dokumen

Dokumen yang dimaksud ialah berbagai sumber data yang dapat berbentuk surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### 1.7.5 Jenis Data

#### a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari informan dan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, adapun data tersebut menyangkut kriteria-kriteria untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti.

#### b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari pihak kedua, data tersebut telah diolah oleh pihak yang berwenang. Data tersebut berasal dari pihak yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

### 1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Menurut Sugiono wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dimana peneliti melakukan tanya jawab terhadap informan guna memperoleh data dan informasi mengenai upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan usaha pengolahan nenas.

#### b. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Dimana peneliti mendapatkan data berdasarkan hasil pengamatan dan

pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala mengenai upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan usaha pengolahan nenas.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiono teknik dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan penelitian. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan konsep teori penelitian ini.

### 1.7.7 Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul.

## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 2.1 Upaya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam Mengembangkan Usaha Pengolahan Nenas di Kecamatan Tambang

#### 2.1.1 Pembinaan dan Pengembangan

Pembinaan dan pengembangan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap industri pengolahan nenas yang ada di Kabupaten Kampar. Dengan adanya pembinaan dan pelatihan industri kecil khususnya nenas, diharapkan mampu membawa perubahan dan membuka wawasan para pemilik usaha industri kecil menengah untuk lebih kreatif dan berinovasi dalam mengembangkan usaha

pengolahan nenas. Sehingga dapat menghasilkan produk-produk dengan varian dan bentuk yang menarik dengan berbahan dasar nenas akan dapat diterima di pasaran.

Sementara itu, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar telah melakukan upaya untuk pembinaan dengan melakukan pelatihan. Adapun pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, yaitu:

- a. Pelatihan dalam bentuk manajemen dalam memberikan pembinaan dan pelatihan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar memberikan pelatihan dan pembinaan kepada industri usaha pengolahan nenas yang ada di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dalam bentuk manajemen, baik yang baru memulai usaha maupun yang sudah ada. Akan tetapi pemerintah lebih berupaya untuk mengembangkan usaha pengolahan nenas yang ada untuk lebih dikembangkan lagi. Pembinaan yang dilakukan dalam bentuk manajemen ini, yaitu bagaimana manajemen bentuk manajemen yang baik sesuai dengan standar operasional kerja dan juga memberikan fasilitas kemudahan produksi dan cara bereproduksi bagi usaha pengolahan nenas yang dapat mana dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha.

- 1) *Manajemen Achievement Motivation Training (AMT)*. Dalam melakukan pembinaan terhadap usaha pengolahan nenas perlu diadakan pembinaan dengan memberikan motivasi kepada industri dimana pembinaan dilakukan dengan melatih dasar manajemen yang baik

dalam melakukan dan menjalankan industri.

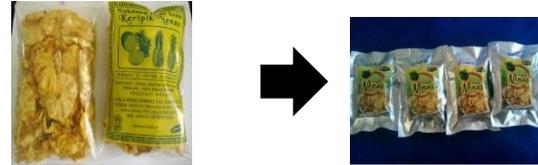
- 2) Pembinaan/ pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Pembinaan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dalam membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) yaitu dengan melakukan pembinaan dan pelatihan.
- b. Pembinaan secara teknis memberi bantuan peralatan/ mesin. Dalam pembinaan secara teknis, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar memberikan penyuluhan dan pelatihan-pelatihan tentang teknologi industri. Setelah peserta para pembinaan usaha pengolahan nenas di didik, dilatih serta diberikan pengetahuan dan keterampilan maka selanjutnya akan di berikan bantuan peralatan atau mesin berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### 2.1.2 Meningkatkan Kualitas Produk

Salah satu yang diupayakan Pemerintah Daerah yaitu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah dalam meningkatkan kualitas produk dari segi tampilan kemasan. Biasanya kemasan yang di gunakan untuk membungkus keripik nenas hanya menggunakan plastik bening dengan tempelan cap kuning, tapi pemerintah daerah akan berupaya untuk memfasilitasi kemasan yang akan di ganti dengan menggunakan pembungkus kemasan *aluminium foil* sehingga tampilanya lebih menarik.

Berikut gambar contoh tampilan kemasan yang menggunakan bungkus plastik biasa dan *aluminium foil* pada gambar III. 1 di bawah ini :

**Gambar 1**  
**Perbandingan Kemasan Kripik Nenas**  
**Plastik pembungkus biasa      *Aluminium foil***



Jika dilihat dari gambar diatas, perbandingan bentuk kemasan yang menggunakan *aluminium foil* lebih menarik dan bagus di banding dengan kemasan yang menggunakan bungkus plastik biasa. Dalam upaya meningkatkan kualitas produk, perubahan kemasan dari bungkus plastik biasa di ganti menjadi *aluminium foil* agar kemasan lebih menarik. Jika kemasanya saja sudah menarik maka pera pembeli akan tertarik dan tergiur untuk membelinya. Seperti yang di ungkapkan dalam hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bidang Pembinaan Industri Kecil Menengah Agusni Mariani, SH mengatakan :

*“Kalau untuk rasa kita tidak kalah, paling kemasan. Rencananya kita akan menggunakan alumunium foil sebagai bungkus kemasan agar lebih menarik dibandingkan dengan dengan plastik yang ditempel cap-cap kuning. Rencana itu nanti kita failitasi karna sebetulnya kita sudah punya rumah kemasan tapi masih terkendala dengan alat. Kalau untuk produksi besar-besaran belum, karena fungsi rumah kemasan itu untuk saat ini kami hanya untuk mendisain. Tapi kalau untuk keperluan alat-alat dan bahan di tanggung oleh pengrajin”* (Kamis, 15 Agustus 2019).

Dari wawancara di atas, bahwa dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bidang Pembinaan Industri Kecil Menengah mengatakan akan memfasilitasi kemasan karena Kabupaten Kampar sudah punya Rumah Kemasan. Selain itu, dengan

adanya rumah kemasan ini pemilik dapat mendisain sendiri bentuk yang diinginkan.

Tampilan kemasan yang menarik merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk meningkatkan minat pembeli dan meningkatkan penjualan usaha pengolahan nenas. namun untuk mendapat hasil yang bagus tentu ada usaha yang maksimal dari pengusaha agar apa yang diinginkan tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. dalam hal ini pemerintah daerah belum memfasilitasi kemasan yang akan di ganti dengan menggunakan *aluminium foil* sehingga masyarakat pun enggan untuk merubahnya, salah satu lasnya karena harga bahan baku pembuatan kemasan yang cukup mahal. Sementara kebanyakan pemilik usaha pengolahan industri nenas terkendala oleh biaya dan mencoba untuk

### **2.1.3 Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk anggaran yang di berikan pihak pemerintah daerah dalam upaya mengembangkan industri pengolahan nenas yang ada di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Kegiatan berupa alokasi dana dengan dipersiapkan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank atau melalui lembaga lain dalam rangka memperkuat permodalan usaha pengolahan nenas yang ada di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. dalam pembiayaan ini usaha pengolahan nenas harus diberikan bimbingan dan mentoring secara intensif dan berkelanjutan agar dapat tercipta sebuah inovasi melalui pembinaan yang berkelanjutan.

Pihak Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar sebagai pemerintah daerah yang berperan dalam upaya pengembangan pengolahan nenas melalui pembinaan dan pengembangan, menjelaskan bahwa dalam masalah pembiayaan dalam rangka mendukung kegiatan ini pada tahun sebelumnya sudah dianggarkan namun anggaran untuk

pengolahan nenas ini tidak selalu ada tiap tahunnya dikarenakan anggaran yang disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja diberikan secara bergantian. seperti wawancara yang dilakukan peneliti dengan Agusni Mariani, SH Bidang Pembinaan Industri Kecil Menengah yang mengatakan :

*“Dalam usaha pengolahan nenas ini Alhamdulillah kita di tahun-tahun sebelumnya ada anggaran untuk berupa kegiatan. Namun anggaran yang kita sediakan untuk pengembangan industri ini tidak sepenuhnya di berikan untuk pengolahan nenas saja, tapi kita secara bergantian tiap tahunnya”* (Kamis, 15 Agustus 2019).

Seperti yang kita ketahui melalui wawancara yang telah dilakukan penulis dengan pihak pengelola industri pengembangan industri pengolahan nenas, bahwa anggaran untuk pengembangan usaha pengolahan nenas melalui pembinaan dan pelatihan ini sangat terbatas karena tidak hanya mengembangkan usaha pengolahan nenas saja yang menjadi prioritas utama tetapi ada industri kecil lainnya yang perlu di lakukan pembinaan oleh pemerintah daerah.

### **2.1.4 Kerjasama**

kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Kerjasama bisa terjadi ketika individu-individu yang bersangkutan mempunyai kepentingan dan kesadaran yang sama untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Dalam melakukan kerjasama, pengaturan kemitraan saling menguntungkan yang dilakukan secara sukarela oleh dua bidang usaha atau lebih. Kerjasama ini menjadi hal yang menguntungkan karena beberapa

permasalahan akan menjadi lebih ringan karena dilakukan bersama-sama. Selain itu, kerjasama tidak hanya soal mencari dana saja. Beberapa pebisnis lebih suka menjalin relasi yang menguntungkan dengan sesama kompetitor.

Pemerintah daerah nantinya akan membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan yang ingin menjalin kerjasama dengan Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk mengembangkan usaha pengolahan nenas di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar melalui sekretaris daerah Kabupaten Kampar. Ini diketahui dari hasil wawancara penulis dengan Agusni Mariani, SH Bidang Pembinaan Industri Kecil Menengah yang mengungkapkan bahwa:

*“kerjasama, kami nantinya melalui Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Kampar kita akan membuka peluang untuk perusahaan-perusahaan salah satunya Transmart tapi masih dalam proses pengembangan baru akan kami jelajahi” (Kamis, 15 Agustus 2019)*

Kerjasama yang diupayakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar telah dicanangkan jauh dari tahun-tahun sebelumnya dengan tujuan agar usaha-industri yang ada di Kabupaten Kampar khususnya usaha pengolahan nenas di Kecamatan Tambang karena memiliki potensi yang sangat bagus jika dikembangkan oleh pemerintah daerah.

## **2.2 Faktor Penghambat Pemerintah Daerah dalam Upaya Mengembangkan Usaha Pengolahan Nenas di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2016-2017**

Adapun faktor-faktor penghambat upaya Pemerintah Daerah dalam mengembangkan usaha pengolahan Nenas di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2016-2017, dengan analisis melalui kajian teori Edward III yang menjelaskan bahwa implementasi

kebijakan yang dipengaruhi oleh 4 (empat) indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang di jelaskan berikut:

### **2.2.1 Komunikasi**

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada pihak komunikan. Konsep komunikasi merupakan sebuah proses untuk mempengaruhi orang lain. Komunikasi dalam implementasi kebijakan dapat mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*tranmisi*), kejelasan informasi (*clariting*), dan konsistensi informasi (*consistency*).

Dalam implementasi kebijakan mengharuskan adanya kejelasan dan konsistensi sehingga kebijakan akan berjalan efektif, dan menghindari kontradiksi perintah untuk melaksanakan kebijakan. Komunikasi yang baik dapat diukur dari indikator yaitu:

- a. Transformasi informasi (*tranmisi*), yaitu kelancaran penyampaian perintah dan arahan (informasi) dari pihak pembuat kebijakan kepada para pelaksana.
- b. Kejelasan Informasi (*clariting*), yaitu kejelasan perintah dan arahan (informasi) yang disampaikan dari pihak pembuat kebijakan kepada para pelaksana.
- c. Konsistensi (*consistency*), yaitu perintah dan arahan (informasi) dari pihak pembuat kebijakan yang diterima oleh pelaksana di lapangan.

Di dalam kajian ini, pihak yang terlibat antara lain Pemerintah Daerah yakni Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar sebagai salah satu pihak yang bertanggungjawab dalam mengembangkan usaha pengolahan nenas di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Dalam upaya pengembangannya, Pemerintah Daerah salah satunya dengan melakukan pembinaan dan pelatihan khusus industri pengolahan nenas.

Namun untuk mengikuti pembinaan dan pelatihan tersebut, terkadang masyarakat pelaku usaha tidak mengetahui informasinya karena informasi yang di dapat lampat dan tidak ada kejelasan datangnya informasi, hal ini karena adanya tebang pilih dalam mengikut sertakan pelaku usaha pengolahan nenas di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar mengingat jumlah peserta pelatihan yang terbatas. Akan tetapi, selama di adakan pelatihan dan pembinaan tersebut peserta pembinaan terkadang tidak mengerti atau sulit untuk memahami apa yang yang di jelaskan oleh para instruktur pelatihan atau narasumbernya. hal ini terungkap dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu pemilik industri keripik nenas Muslimin, berikut kutipan wawancaranya:

*"kami jarang mendapat informasi mengenai adanya pembinaan dan pelatihan yang di selenggarakan oleh pemerintah. Biasa jadi pemerintah lebih mendahulukan kelompok usaha sebelumnya, dan kalau ada dulu-dulu tu kami agak kurang paham sikit"(Rabu, 14 Agustus 2019).*

Pentingnya komunikasi dalam sebuah instansi atau hubungan kerja lainnya, karna dengan adanya komunikasi yang baik maka terbentuklah sebuah hubungan yang baik pula begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini komunikasi antara Pemerintah Daerah dalam hal ini pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam upaya mengembangkan industri pengolahan nenas yang ada di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar bisa dibilang kurang baik. Selain itu juga pentingnya komunikasi yaitu sebagai penentu keberhasilan implementasi kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan serta tujuan dan sasaran yang harus dilaksanakan dalam mencapai target.

### **2.2.2 Sumber Daya**

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk

melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya memiliki peran penting dalam suatu implementasi kebijakan. Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukannya, maka implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan efektif. Jadi sumberdaya merupakan faktor yang mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya dapat dilihat dari :

- a. Sumber daya Manusia, yaitu jumlah staf atau para pelaksana dan kemampuannya secara teknis maupun manajerial.
- b. Anggaran (*budgetary*), yaitu pendanaan atas kegiatan atau program yang akan dilaksanakan.
- c. Fasilitas (*facility*), yaitu dukungan dari sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kebijakan.
- d. Kewenangan (*authority*), yaitu wewenang para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan.

Dari keempat indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sumber daya diatas, maka yang menjadi kendala utama bagi Pemerintah Daerah dalam upaya mengembangkan usaha pengolahan nenas yang ada di Kecamatan Tambang yaitu masalah anggaran. Pemerintah Daerah yaitu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar merupakan salah satu pihak yang berwenang dalam upaya mengembangkan industri pengolahan nenas yang ada di Kecamatan Tambang. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berupaya mengembangkan usaha pengolahan nenas yang ada di Kecamatan Tambang melalui program-program kerja yang dibuat. Program-program kerja yang dibuat tidak akan berjalan tanpa adanya sokongan terutama anggaran dana dari setiap

program-program yang dibuat, karena mengenai masalah anggaran dalam usaha pengolahan nenas ini sangatlah terbatas.

Anggaran merupakan salah satu faktor utama yang menjadi permasalahan yang di hadapi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam upaya mengembangkan usaha pengolahan nenas yang ada di Kecamatan Tambang, hal ini di karenakan IKM yang ada di Kabupaten Kampar tidak hanya Pengolahan nenas saja, tapi ada banyak jenis IKM lain yang juga menjadi perhatian pemerintah daerah jadi anggarannya harus di bagi-bagi. Keterbatasan anggaran dapat menjadi permasalahan utama dalam usaha pengolahan nenas karna dapat menghambat proses perkembangan industri.

### **2.2.3 Disposisi**

Kecendrungan perilaku dari pelaksana kebijakan berperan penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Sikap dari pelaksana menentukan dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini, sikap Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja selaku pihak yang bertanggungjawab dalam mengembangkan usaha pengolahan Nenas yang ada di Kecamatan Tambang. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Selain keterlibatan masyarakat sebagai pelaku usaha dalam hal ini yaitu berbagai pengrajin olahan nenas. Pemerintah Daerah selaku pihak yang memiliki wewenang dalam membuat sebuah kebijakan untuk mengembangkan usaha pengolahan nenas yang ada di Kecamatan Tambang dalam hal ini pihak bertanggungjawab adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar pelaksana kebijakan berperan

penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran, salah satu bentuk kebijakan yang perlu dilakukan untuk mengembangkannya yaitu dari segi tampilan kemasan.

Kemasan adalah salah satu senjata paling efektif dan manjur untuk menjangkau impresi calon pelanggan terhadap produk yang di tawarkan. Dengan impresi positif tentunya konsumen akan tanpa ragu untuk membeli produk yang ia butuhkan. Hal seperti inilah yang harusnya di pikirkan oleh para pemilik usaha pengolahan nenas yang ada di Kecamatan Tambang. Kemasan memang merupakan hal yang sepele untuk di kembangkan, tetapi dengan kreatifitas dan inovasi..maka bukan tidak mungkin kita akan mendapatkan keuntungan yang ada di dalamnya.Kemasan sendiri dewasa ini mempunyai arti dan peran penting selain hanya untuk melindungi isi kemasna itu sendiri. Di tangan orang-orang kreatif dan inovatif, model kemasan bisa di sulap menjadi amunisi baru untuk berjualan. Zaman sekarang yang namanya kemasan haruslah bisa mempresentasikan isi dari kemasan di dalamnya. Beragam informasi penting seputar isi, bahan, hingga tampilan fisik harus dapat di tampilkan secara utuh dan komprehensif.

### **2.2.4 Struktur Birokrasi**

Aspek ini melingkupi 2 hal yaitu mekanisme dan strukrur birokrasi itu sendiri yang pertama mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation prosedur (SOP), yang kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemah pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan komplek yang selanjutnya menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Kebijakan yang begitu beragam menuntut diadakannya kerja sama banyak orang ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menyebabkan sumber-

sumber daya menjadi efektif sehingga dalam Penerapan kebijakan tersebut terhambat. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan sebuah kebijakan harus mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan jalan melakukan kordinasi dengan baik.

Dalam struktur birokrasi, banyaknya kebijakan yang begitu beragam menuntut sebuah kemajuan kearah yang lebih baik namun dengan terlalu banyaknya pembentukan program-program kerja yang dibuat sementara untuk pelaksanaannya tidak berjalan di karenakan masalah pendanaan. seperti wawancara yang dilakukan penulis dengan Agusni Mariani, SH selaku Bidang Pembinaan Industri Kecil Menengah yang mengatakan:

*“Program-program pemerintah itu banyak, apalagi untuk masalah pengembangan ini, namun sebanyak apapun program kerja yang dibuat kalau tidak dilaksanakan juga percuma apalagi kalau tidak ada sokongan dana itu akan semakin sulit untuk kami mengelolanya”*  
(Kamis, 15 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber diatas, maka mengenai banyaknya struktur, rencana dan program-program kerja yang di buat oleh pemerintah, maka tidak akan berjalan dengan baik kalau pemerintah itu sendiri tidak berupaya untuk mendukung rencana tersebut dengan menyediakan anggaran sesuai bagi setiap program kerja yang ada. Lebih baik memiliki sedikit program kerja namun menjadi prioritas dan memiliki kemajuan yang signifikan diabanding dengan banyak program namun tidak terealisasi dengan baik.

### III PENUTUP

#### 3.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian dan analisis yang penulis lakukan mengenai upaya pemerintah daerah yaitu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kampar dalam mengembangkan usaha pengolahan nenas di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan usaha pengolahan nenas ini masih kurang optimal.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan usaha pengolahan nenas di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yaitu keterbatasan anggaran dan tampilan kemasan yang kurang menarik. Minimnya anggaran yang di sediakan dalam pembinaan dan pengembangan IKM yang mengharuskan pembinaan dan pengembangan dilakukan secara bergantian tidak hanya usaha industri pengolahan nenas namun juga industri-industri lain yang ada di Kabupaten Kampar. Serta tampilan kemasan yang hanya menggunakan bungkus plastik putih biasa dengan di tempelkan cap-cap kuning sebagai merek.

#### 3.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja agar pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan dalam mengembangkan usaha pengolahan nenas di Kecamatan Tambang berjalan optimal. Kemudian untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, melalui penelitian ini dapat dijadikan evaluasi sehingga dapat meningkatkan upaya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam mengembangkan usaha pengolahan nenas guna menciptakan produk-produk baru dengan berbahan dasar nenas dengan berbagai bentuk dan varian yang menarik. Kemudian lebih berusaha dalam menjalin kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam pengembangan usaha pengolahan nenas.

2. Bagi masyarakat Kabupaten Kampar terutama yang memiliki usaha pengolahan nenas yang ada di Kecamatan Tambang untuk saling bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan usaha pengolahan nenas yang ada. Dimana nantinya akan terbentuk suatu hubungan yang saling menguntungkan antar kedua pihak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan untuk lebih memberi kontribusi yang lebih baik lagi dari penelitian sebelumnya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Bagong, Suyanto. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Budiardjo, Miriam. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moleong, Lexy j. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Narkowo, J. Dwi dan Bagong Suyanto, 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Rahayu, Ani Sri. 2008. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sinaga, Rudi Salam. 2013. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukardi, 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana. 1998. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT Pertja.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Winarmo, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan studi Kasus*, Jakarta: CAPS

### Artikel Ilmiah

- Aliffiana, Definta. 2017. *Upaya Pemerintah Daerah dalam Memperdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sentra Industri Konveksidan Bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus*. Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Hardianti, Desi. 2018. *Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Pariwisata Festival Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2017*. Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau.
- Hidayat, Fauzi Ari. 2016. *Upaya Pemerintah Dalam Pemekaran Dusun di Desa Muara Takus*

Tahun 2015. Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau.

Prayogi, Esra Riko. 2016. *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Penembangan Kawasan Pusat Pendidikan Tahun 2010-2015*. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau.

Ramdhan, Abdullah dan Muhammad Ali Ramdhani, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Program Studi Administrasi Publik, Universitas Garut dan Program Studi Teknik Informatika, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

### **Undang-undang**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Bab I Pasal 12

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Industri pasal 1 ayat 2

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang perubahan pertama atas peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

### **Dokumen**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar  
Badan Pusat Statistik Kecamatan Tambang  
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar

Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar tahun 2017-2022

### **Sumber lain**

<http://www.artikelsiana.com/2017/08/pengertian-pembangunan-tujuan-menurut-para-ahli-ciri-ciri.html>

[http://blog-pinta.blogspot.com/2013/06/kewirausahaan\\_4953.html](http://blog-pinta.blogspot.com/2013/06/kewirausahaan_4953.html)

<https://www.maxmanroe.com/pengertian-kerjasama.html>

<https://brandadventureindonesia.com/5-kekuatan-kemasan-yang-menarik/>